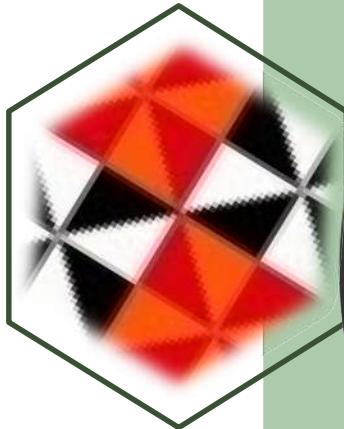




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RENCANA AKSI TAHUN 2024



JL. TULIP NO. 3 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP./FAX. (0728) 21164
KODE POS 34811
2023



RENCANA AKSI 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Aksi 2024 berisi :

- A. Rencana Strategis Perangkat Daerah
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- D. Lampiran Rencana Aksi 2024

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lampung Barat.

Rencana aksi ini merupakan instrumen perencanaan dan alat kendali serta tolok ukur dalam penyelenggaraan kegiatan guna mendukung proses pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjadwal waktu pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Rencana aksi/kerja ini disusun selaras dengan Renja 2023 dan Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, mengacu dokumen tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 telah menetapkan tujuan setrategis yaitu :

- | | |
|------------------|---|
| Tujuan | : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat. |
| Indikator Tujuan | : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama. |
| Target Kinerja | : 84.15 poin (Sangat Baik). |



Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut yaitu :

Sasaran I : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator Sasaran : Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Teget Kinerja : 100%

Sasaran II : Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Teget Kinerja : 86%.

2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Mitra Dengan Pemerintah.

Teget Kinerja : 5,54%.

Dengan adanya penetapan tujuan dan sasaran berserta indikator dan targetnya maka hal tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai target kinerjanya.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, berikut ini telah dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital.
2. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat.
3. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga.



4. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun.
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas.
6. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat.
7. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman demokrasi.
8. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik.

Begitu pula untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis dan rencana kerja tahun 2024 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama.
2. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan.
3. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila.
4. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air.
6. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
7. Memperkuat koordinasi antar lembaga.
9. Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
10. Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat.
12. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
13. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik;



C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Lampung Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsungnya.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100.00%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	86%
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,54%

2. Kerangka Pendanaan

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk mengakomodir kebijakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memperoleh pagu anggaran sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran Rp. 30.848.149.719,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.661.419.700,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.373.936.340,00 dan belanja Hibah sebesar Rp. 26.759.768.579,00, dan Belanja Modal sebesar Rp. 53.025.100,00.

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut :



**Kerangka Pendanaan dan Rencana Aksi Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2024	RENCANA KERJA TAHUN 2024	
			1	2
3	4			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.992.246.000,00		
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24.855.800,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain : ➤ Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi dokumen perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan perubahannya pada tahun 2024. ➤ Penyusunan dokumen rencana anggaran perangkat daerah meliputi penyusunan RKA tahun 2025, Perubahan RKA tahun 2024, DPA tahun 2025 dan Perubahan DPA tahun 2024 pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja. ➤ Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi penyusunan LKjIP, LPPD, LKPD, LKPJ, Evaluasi Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah.	
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	1.650.568.700,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain : ➤ Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai yang bertugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. ➤ Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024. ➤ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Tahun 2024. ➤ Penyusunan Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Tahun 2024.	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.234.000,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu penyusunan dan pengelolaan barang milik daerah.	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.872.000,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu penyusunan dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.	



1	2	3	4
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.259.600,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain : ➢ Penyediaan alat komponen listrik untuk penerangan gedung kantor. ➢ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. ➢ Penyediaan bahan bacaan. ➢ Penyediaan jamuan untuk tamu. ➢ Pembiayaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Lampung Barat.
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.500.000,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka mengukung kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu : ➢ Pengadaan rak untuk penyimpanan arsip kantor. ➢ Pengadaan meja rapat. ➢ Pengadaan mesin scanner dokumen.
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.809.900,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain : ➢ Kegiatan administrasi surat menyurat. ➢ Belanja jasa atas tagihan pemakaian listrik, air dan telekomunikasi yang telah dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. ➢ Belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan perangkat daerah.
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.146.000,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain : ➢ Pembayaran pajak kendaraan dinas serta pembiayaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat meliputi pembelian BBM, service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas. ➢ Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain computer, laptop printer dan genset. ➢ Belanja pemeliharaan gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.



1	2	3	4
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.011.884.840,00	
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.011.884.840,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan target peserta sebanyak 100 orang.2. Sosialisasi Pemahaman Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi dengan target peserta sebanyak 100 orang.3. Sosialisasi tentang Kepaskibrakaan dilingkungan sekolah-sekolah diwilayah Kabupaten Lampung Barat dengan target peserta sebanyak 100 orang.4. Seleksi dan pembentukan anggota Paskibraka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.5. Pengadaan perlengkapan anggota paskibraka.
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	23.039.839.829,00	
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	23.039.839.829,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Belanja honorarium dan biaya operasional Tim DESK Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.2. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Sosialisasi Politik dalam rangka sukses Pilkada Serentak 2024 dengan target peserta sebanyak 100 orang.3. Penyelenggaraan forum diskusi politik bagi anggota partai politik berserta pihak-pihak terkait dengan target peserta sebanyak 100 orang.4. Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan sebagai anggota di DPRD Kab. LB.5. Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	457.042.000,00	
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	457.042.000,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan data keberadaan partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum yang ada di Kabupaten Lampung Barat.2. Penyelenggaran kegiatan Forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat dengan target peserta sebanyak 60 orang.3. Bantuan hibah uang kepada Ormas berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.



1	2	3	4
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	391.255.900,00	
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	391.255.900,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Mengikuti ajang pameran produk unggulan Kabupaten Lampung Barat di TMII dalam rangka mendukung revitalisasi anjungan TMII di Jakarta direncanakan sebanyak 1 kali.2. Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan target peserta sebanyak 40 orang.3. Pembinaan Pekon Bersinar (Pekon Bersih Narkoba) target sebanyak 1 pekon.4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi pengurus forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Barat dengan target pelaksanaan sebanyak 4 kali.5. Bantuan hibah uang dan fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi anggota FKUB Kabupaten Lampung Barat.6. Kegiatan survey penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung.
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.955.881.150,00	
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.955.881.150,00	Pada kegiatan ini rencana penggunaan anggaran akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan keberadaan orang asing diwilayah Kabupaten Lampung Barat.2. Pemantauan kondisi wilayah dalam rangka kesapadaan dini.3. Penyediaan biaya operasional untuk anggota intelejen daerah di Kabupaten Lampung Barat.4. Penyelenggaraan kordinasi antara pimpinan daerah dengan lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.5. Pemberian hibah uang dan barang kepada instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.6. Pemberian hibah untuk keperluan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 kepada Polres Lampung Barat dan Kodim 0422/LB.
JUMLAH		30.848.149.719,00	



Secara terperinci target kinerja dan keuangan per triwulan dapat terlihat pada Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terlampir.

Liwa, 22 Februari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005

**RENCANA AKSI TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN AKUMULATIF				NAMA JABATAN PENANGGUNGJAWAB
			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4	
1	MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	-	-	-	-	Menurunnya Konflik SARA Sangat Tinggi (84.15) Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%	BURLIANTO EKA PUTRA, S.H. KEPALA BADAN KESBANGPOL
								Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	86%	86%	86%	86%	
								Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	-	5,54%	5,54%	5,54%	

Liwa, 22 Februari 2024
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Lampiran II

RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF TARGET	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF TARGET	NAMA JABATAN PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1 = 76,05 Poin	Trw 1 = Rp 1,085,202,581	WAHYUDI HERU ISKANDAR, S.Sos., M.I.P. / SEKRETARIS BANDAR KESBANGPOL
					Trw 2 = 76,05 Poin	Trw 2 = Rp 1,152,386,681	
					Trw 3 = 76,05 Poin	Trw 3 = Rp 1,931,952,100	
					Trw 4 = 76,05 Poin	Trw 4 = Rp 1,992,246,000	
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat	Percentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 206,792,200	SUMARLIN, S.I.Kom., M.E.Sy. / KABID. IDIOLOGI WAWSAN KEBANGSAAN DAN KESBA
					Trw 2 = 70%	Trw 2 = Rp 585,096,200	
					Trw 3 = 80%	Trw 3 = Rp 1,001,194,840	
					Trw 4 = 80%	Trw 4 = Rp 1,011,884,840	
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Etika dan Budaya Politik Partai Politik masyarakat	Percentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 928,786,272	PANGKU HAZARONI, S.Pd. / KABID. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS
					Trw 2 = 65%	Trw 2 = Rp 22,820,206,829	
					Trw 3 = 69%	Trw 3 = Rp 22,916,115,829	
					Trw 4 = 69%	Trw 4 = Rp 23,039,839,829	
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Percentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	Trw 1 = 55%	Trw 1 = Rp 272,400,000	PANGKU HAZARONI, S.Pd. / KABID. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS
					Trw 2 = 55%	Trw 2 = Rp 355,787,000	
					Trw 3 = 55%	Trw 3 = Rp 448,097,000	
					Trw 4 = 55%	Trw 4 = Rp 457,042,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Percentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 113,013,000	SUMARLIN, S.I.Kom., M.E.Sy. / KABID. IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KESBA
					Trw 2 = 65%	Trw 2 = Rp 246,874,300	
					Trw 3 = 71%	Trw 3 = Rp 297,465,500	
					Trw 4 = 71%	Trw 4 = Rp 391,255,900	
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan aparatur dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Percentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	Trw 1 = 100%	Trw 1 = Rp 40,261,000	NAZORI, S.Sos. / KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
					Trw 2 = 100%	Trw 2 = Rp 3,851,956,750	
					Trw 3 = 100%	Trw 3 = Rp 3,867,106,750	
					Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp 3,955,881,150	

Liwa, 22 Februari 2024
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
 NIP, 197109241998031005

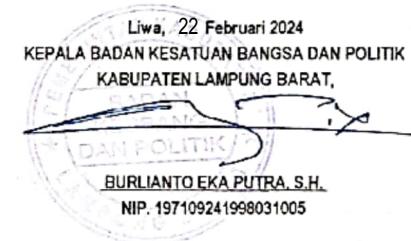
**RENCANA AKSI TINGKAT KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF	NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 8 Dokumen 3 Laporan Trw 2 = 9 Dokumen 7 Laporan	Trw 1 = Rp 3,785,500 Trw 2 = Rp 8,618,000	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 3 = 12 Dokumen 10 Laporan	Trw 3 = Rp 18,534,000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkaDaerah	Trw 4 = 15 Dokumen 14 Laporan	Trw 4 = Rp 24,855,800	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 = 14 Orang	Trw 1 = Rp 931,546,781	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 2 = 14 Orang 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 933,423,281	
			Tersedianya Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Trw 3 = 14 Orang 2 Dokumen	Trw 3 = Rp 1,646,340,200		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 4 = 14 Orang 4 Dokumen	Trw 4 = Rp 1,650,568,700	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 5,423,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Trw 2 =	Trw 2 = Rp 10,441,000		
					Trw 3 =	Trw 3 = Rp 10,441,000		
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 11,234,000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 6,432,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Trw 2 =	Trw 2 = Rp 6,432,000		
					Trw 3 =	Trw 3 = Rp 12,872,000		
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 12,872,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	3 Paket Trw 1 = 6 Dokumen 6 Laporan	Trw 1 = Rp 40,208,800	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	3 Paket Trw 2 = 6 Dokumen 12 Laporan	Trw 2 = Rp 58,286,800	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	3 Paket Trw 3 = 6 Dokumen 18 Laporan	Trw 3 = Rp 80,896,600	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Paket Trw 4 = 6 Dokumen 24 Laporan	Trw 4 = Rp 99,259,600	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Trw 1 = 9 unit Trw 2 = 9 unit Trw 3 = 9 unit Trw 4 = 9 unit	Trw 1 = Rp 55,500,000 Trw 2 = Rp 55,500,000 Trw 3 = Rp 55,500,000 Trw 4 = Rp 55,500,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan surat-menyrat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 15 Laporan	Trw 1 = Rp 19,701,500	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 2 = 30 Laporan	Trw 2 = Rp 38,510,600	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 45 Laporan	Trw 3 = Rp 57,042,800	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 4 = 61 Laporan	Trw 4 = Rp 75,809,900	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 206,792,200	PEGA YANTI, S.I.P. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 2 = 250 orang	Trw 2 = Rp 585,096,200	
				Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Trw 3 = 250 orang 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 1,001,194,840	
				Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskira	Trw 4 = 250 orang 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 1,011,884,840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Situasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 80 Orang 1 Laporan	Trw 1 = Rp 928,786,272	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 2 = 80 Orang 1 Laporan	Trw 2 = Rp 22,820,206,829	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 3 = 80 Orang 1 Laporan	Trw 3 = Rp 22,916,115,829	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 4 = 80 Orang 1 Laporan	Trw 4 = Rp 23,039,839,829	
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Trw 1 = 46 Orang	Trw 1 = Rp 272,400,000	ANWAR SANI KHALIK, S.I.P., M.M. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 3 = 46 Orang	Trw 3 = Rp 448,097,000	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 4 = 1 Dokumen 46 Orang	Trw 4 = Rp 457,042,000	
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 = 70 Orang	Trw 1 = Rp 113,013,000	SYUBBAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 2 = 70 Orang	Trw 2 = Rp 246,874,300	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 3 = 70 Orang 1 Laporan	Trw 3 = Rp 297,465,500	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 4 = 70 Orang 1 Laporan	Trw 4 = Rp 391,255,900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 25 Orang 4 Laporan	Trw 1 = Rp 40,261,000	RINA WATI, S.I.P., / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA dan YUZIR, S.E., / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 2 = 25 Orang 8 Laporan	Trw 2 = Rp 3,851,956,750	
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Trw 3 = 25 Orang 12 Laporan	Trw 3 = Rp 3,867,106,750	
						Trw 4 = 25 Orang 15 Laporan	Trw 4 = Rp 3,955,881,150	



**RENCANA AKSI TINGKAT SUB KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF	NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 8 Dokumen	Trw 1 = Rp 2,205,500	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = Rp 2,205,500		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = Rp 3,884,000		
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = Rp 3,884,000		
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 1,729,500		
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 3,057,000		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 3,057,000		
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 =	Trw 2 = Rp -		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2,577,000		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,577,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp 1,838,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 1,838,000		
							Trw 4 = 2 Laporan	Trw 4 = Rp 3,527,000		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkaDaerah	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 1,580,000 Trw 2 = Rp 2,845,000 Trw 3 = Rp 4,110,000 Trw 4 = Rp 5,664,800	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 = 14 Orang Trw 2 = 15 Orang Trw 3 = 15 Orang Trw 4 = 15 Orang	Trw 1 = Rp 931,546,781 Trw 2 = Rp 931,546,781 Trw 3 = Rp 1,641,969,700 Trw 4 = Rp 1,641,969,700	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = Rp 2,542,000	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 = Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Rp 1,876,500 Trw 3 = Rp 1,876,500 Trw 4 = Rp 3,563,000	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Rp 2,494,000 Trw 4 = Rp 2,494,000	MUCHLISUN, S.I.P., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 5,423,000 Trw 2 = Rp 10,441,000 Trw 3 = Rp 10,441,000 Trw 4 = Rp 11,234,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Administrasi Keppegawaiian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 6,432,000 Trw 2 = Rp 6,432,000 Trw 3 = Rp 12,872,000 Trw 4 = Rp 12,872,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Trw 1 = 1 paket Trw 2 = 1 paket Trw 3 = 1 paket Trw 4 = 1 paket	Trw 1 = Rp 1,086,800 Trw 2 = Rp 1,086,800 Trw 3 = Rp 2,163,600 Trw 4 = Rp 2,163,600	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Trw 1 = 2 paket Trw 2 = 2 paket Trw 3 = 2 paket Trw 4 = 2 paket	Trw 1 = Rp 3,100,000 Trw 2 = Rp 5,975,000 Trw 3 = Rp 9,010,000 Trw 4 = Rp 12,210,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Trw 1 = 6 dokumen Trw 2 = 6 dokumen Trw 3 = 6 dokumen Trw 4 = 6 dokumen	Trw 1 = Rp 1,440,000 Trw 2 = Rp 2,880,000 Trw 3 = Rp 4,320,000 Trw 4 = Rp 5,760,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 762,000 Trw 2 = Rp 1,775,000 Trw 3 = Rp 2,623,000 Trw 4 = Rp 3,596,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 33,820,000 Trw 2 = Rp 46,570,000 Trw 3 = Rp 62,780,000 Trw 4 = Rp 75,530,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Terlaksananya kegiatan surat-menjurat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Trw 1 = 8 unit Trw 2 = 8 unit Trw 3 = 8 unit Trw 4 = 8 unit	Trw 1 = Rp 39,500,000 Trw 2 = Rp 39,500,000 Trw 3 = Rp 39,500,000 Trw 4 = Rp 39,500,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 1 unit Trw 3 = 1 unit Trw 4 = 1 unit	Trw 1 = Rp 16,000,000 Trw 2 = Rp 16,000,000 Trw 3 = Rp 16,000,000 Trw 4 = Rp 16,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menjurat	Terlaksananya kegiatan surat-menjurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menjurat	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp 450,000 Trw 2 = Rp 900,000 Trw 3 = Rp 1,350,000 Trw 4 = Rp 1,800,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Trw 1 = 12 Laporan Trw 2 = 24 laporan Trw 3 = 36 laporan Trw 4 = 48 laporan	Trw 1 = Rp 3,985,000 Trw 2 = Rp 7,920,000 Trw 3 = Rp 11,905,000 Trw 4 = Rp 15,840,000	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
				Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp 15,266,500 Trw 2 = Rp 29,690,600 Trw 3 = Rp 43,787,800 Trw 4 = Rp 58,169,900	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 5 unit Trw 3 = 5 unit Trw 4 = 5 unit	Trw 1 = Rp 20,450,000 Trw 2 = Rp 27,400,000 Trw 3 = Rp 35,100,000 Trw 4 = Rp 45,300,000	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 4 unit Trw 2 = 6 unit Trw 3 = 8 unit Trw 4 = 11 unit	Trw 1 = Rp 2,155,000 Trw 2 = Rp 3,775,500 Trw 3 = Rp 5,226,000 Trw 4 = Rp 6,846,500	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Trw 1 = Trw 2 = 1 unit Trw 3 = 1 unit Trw 4 = 1 unit	Trw 1 = Trw 2 = Rp 9,999,500 Trw 3 = Rp 9,999,500 Trw 4 = Rp 9,999,500	ELDA, S.H, / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebujukan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 = Trw 2 = 100 Orang Trw 3 = 100 Orang Trw 4 = 100 Orang	Trw 1 = Rp 8,500,000 Trw 2 = Rp 62,257,000 Trw 3 = Rp 62,257,000 Trw 4 = Rp 62,257,000	PEGA YANTI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 = Trw 2 = 100 Orang Trw 3 = 100 Orang Trw 4 = 100 Orang	Trw 1 = Trw 2 = Rp 56,417,000 Trw 3 = Rp 56,417,000 Trw 4 = Rp 56,417,000	PEGA YANTI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
				Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 57,863,000 Trw 2 = Rp 180,437,000 Trw 3 = Rp 193,897,000 Trw 4 = Rp 193,897,000	PEGA YANTI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskbra	Trw 1 = Trw 2 = 50 Orang Trw 3 = 50 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 1 = Rp 140,429,200 Trw 2 = Rp 285,985,200 Trw 3 = Rp 688,623,840 Trw 4 = Rp 699,313,840	PEGA YANTI, S.I.P. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 213 Orang Trw 2 = 213 Orang Trw 3 = 213 Orang Trw 4 = 213 Orang	Trw 1 = Rp 237,282,000 Trw 2 = Rp 241,954,000 Trw 3 = Rp 330,778,000 Trw 4 = Rp 400,000,000	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = Trw 2 = 100 Orang Trw 3 = 100 Orang Trw 4 = 160 Orang	Trw 1 = Rp 11,170,000 Trw 2 = Rp 57,935,500 Trw 3 = Rp 57,935,500 Trw 4 = Rp 102,547,500	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 2 Laporan Trw 2 = 10 Laporan Trw 3 = 10 Laporan Trw 4 = 10 Laporan	Trw 1 = Rp 680,334,272 Trw 2 = Rp 22,520,317,329 Trw 3 = Rp 22,527,402,329 Trw 4 = Rp 22,537,292,329	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 11,200,000	ANWAR SANI KHALIK, S.I.P., M.M. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 12,400,000	
							Trw 3 =	Trw 3 = Rp 21,310,000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 29,055,000	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 261,200,000	ANWAR SANI KHALIK, S.I.P., M.M. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
							Trw 2 = 60 Orang	Trw 2 = Rp 343,387,000	
							Trw 3 = 60 Orang	Trw 3 = Rp 426,787,000	
							Trw 4 = 60 Orang	Trw 4 = Rp 427,987,000	
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 3,460,000	SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 2 = 40 Orang	Trw 2 = Rp 129,471,300	
							Trw 3 = 48 Orang	Trw 3 = Rp 167,962,500	
							Trw 4 = 48 Orang	Trw 4 = Rp 175,842,500	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 109,553,000	SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
							Trw 2 =	Trw 2 = Rp 117,403,000	
							Trw 3 =	Trw 3 = Rp 125,253,000	
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 133,103,000	
									- SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 25 Orang	Trw 1 = Rp 8,773,000	RINA WATI, S.I.P. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 2 = 25 Orang	Trw 2 = Rp 11,268,000	
				Sub Kegiatan Forum koordinasi Pimpinan Daerah			Trw 3 = 25 Orang	Trw 3 = Rp 19,018,000	
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Trw 4 = 25 Orang	Trw 4 = Rp 22,000,000	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 23,250,000	YUZIR, S.E. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 57,800,500	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 53,590,500	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 4 = 11 Laporan	Trw 4 = Rp 131,793,500	
				Sub Kegiatan Forum koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp 8,238,000	YUZIR, S.E. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 2 = 2 Laporan	Trw 2 = Rp 3,782,888,250	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 3 = 3 Laporan	Trw 3 = Rp 3,794,498,250	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Trw 4 = 4 Laporan	Trw 4 = Rp 3,802,087,650	

